



Pax Silica vs. WAICO: Pemanfaatan Persaingan Geopolitik dalam Pengembangan AI Indonesia

disusun oleh:

Putri Larasati Widhiasih / Fabya

ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI BILATERAL

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Ringkasan Eksekutif

Persaingan AI global antara Amerika Serikat (AS) melalui **Pax Silica** dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui **WAICO** telah berkembang dari kompetisi teknologi menjadi kompetisi pembentukan arsitektur tata kelola AI global. Dihadapkan pada dilema polarisasi antara dua kekuatan besar tersebut, disertai dengan risiko yang muncul dengan adanya dua inisiatif tersebut, Indonesia perlu merancang strategi untuk mengoptimalkan pembangunan AI nasional tanpa mengurangi otonomi strategis maupun prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif. Berdasarkan analisis dengan menggunakan 5 *Whys*, akar masalah yang didapati adalah **belum adanya strategi transisional untuk mengamankan akses teknologi global dalam membangun AI Nasional, tanpa mengurangi otonomi strategis Indonesia maupun menggeser posisi polugri Bebas-Aktif.**

Berdasarkan hasil analisis dengan MCDA, Indonesia perlu menerapkan ***Calibrated Dual-Track Engagement Strategy***, yaitu mengoptimalkan peran sebagai *Founding Member* WAICO sekaligus memperkuat kerja sama bilateral dengan AS pada sektor-sektor prioritas serta mengevaluasi keterlibatan yang lebih luas dalam Pax Silica maupun *Joint Statement on AI Opportunity* (JS on AI). Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian ESDM, dan K/L terkait lainnya perlu bersinergi untuk menyelaraskan strategi *Calibrated Dual-Track Engagement* dengan pembangunan AI nasional.

I. Pendahuluan

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi faktor utama yang menentukan daya saing ekonomi, ketahanan nasional, dan pengaruh geopolitik dari suatu bangsa. Saat ini, persaingan global tidak hanya terbatas

pada pengembangan model AI, namun telah berkembang menjadi penguasaan seluruh ekosistem AI, mulai dari rantai pasok, semikonduktor, infrastruktur komputansi, *data centre*, talenta digital, hingga pembentukan tata kelola AI global.

Dalam konteks tersebut, AI tidak lagi dipandang sebagai sebatas teknologi, namun telah berkembang menjadi *tools* untuk membentuk kekuatan ekonomi dan politik global, khususnya oleh dua kekuatan besar teknologi dunia, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Gambar 1. Peluncuran Pax Silica Initiative di Washington, D.C., 12 Desember 2025



Sumber: US State Department, 2025

AS meluncurkan Pax Silica pada Desember 2025 sebagai inisiatif untuk memperkuat rantai pasok semikonduktor, mineral kritis, dan teknologi AI di antara negara-negara mitra yang memiliki nilai strategis sejalan (*trusted partners*), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap RRT (Gambar 1). Sebaliknya, pada periode yang sama, RRT membentuk *World Artificial Intelligence Cooperation Organization* (WAICO) sebagai *platform* kerja sama multilateral yang lebih inklusif untuk memperluas pengaruhnya dalam penyusunan tata kelola AI global dan memperkuat posisinya sebagai *rule-maker* dalam tatanan teknologi internasional.

Gambar 2. Peluncuran WAICO di Shanghai, 16 Juli 2026



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2026

Sebagai negara dengan potensi pasar AI yang besar dan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia menjadi salah satu mitra yang "diperebutkan" oleh kedua inisiatif tersebut. Pada bulan Juni 2026, AS mengundang Indonesia untuk bergabung dalam *Joint Statement on AI Opportunity* (JS on AI) dan menghadiri Pax Silica Summit sebagai *observer*. Di sisi lain, Indonesia menerima undangan RRT untuk menjadi *Founding Member* WAICO, yang kemudian disetujui oleh Presiden Republik Indonesia dan ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian oleh Menko Perekonomian pada Juli 2026 (Gambar 2).

Perkembangan tersebut menempatkan Indonesia pada dilema polarisasi dalam pembangunan AI nasional secara optimal, tanpa mengurangi otonomi strategis maupun mengesampingkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dilema polarisasi antara Pax Silica dan WAICO harus segera ditangani, mengingat adanya risiko geopolitik, pergolakan politik dalam negeri, industri, rantai pasok, perdagangan, investasi, dan keberlangsungan program.

Policy brief ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah RI,

khususnya Kemenko Perekonomian, dalam menghadapi dilema dan risiko tersebut.

II. Deskripsi Masalah

Berdasarkan analisis dengan menggunakan 5 *WHYs*, keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Pax Silica dan WAICO memunculkan dilema polarisasi, khususnya karena kedua negara merupakan mitra perdagangan dan investasi utama bagi RI. Selain merupakan mitra perdagangan dan investasi terbesar RI, ketergantungan RI dengan teknologi AI dan jaringan komunikasi dari kedua negara sangat tinggi. Ketergantungan tinggi oleh teknologi dan ekosistem AI ini kemudian memunculkan risiko-risiko untuk dimitigasi. Beberapa risiko yang teridentifikasi adalah:

a. **Risiko geopolitik:** persepsi bahwa Indonesia berpihak pada hanya salah satu kekuatan besar di tengah kompetisi antara AS dan RRT.

➔ Pada tanggal 26 Juni 2026, KBRI Beijing menerima *demarche* dari Kedutaan Besar AS di Beijing. AS menganggap inisiatif RRT tersebut "*tidak transparan, agenda komunis, teknologi di bawah standar, berisiko menciptakan ketergantungan, dan berbahaya secara komersial*".

b. **Risiko politik dalam negeri:** pergolakan politik dalam negeri dan penolakan K/L.

➔ Risiko tinggi dalam Pax Silica bagi Indonesia adalah keberadaan Israel sebagai *Lead Country* pada

Pax Silica, khususnya pada program *AI Distillation* dan *AI Infrastructure* (Gambar 3). Kepemimpinan Israel ini berpotensi menimbulkan optik politik buruk bagi Indonesia.

Gambar 3. Penandatanganan *Joint Statement* dan Pax Silica oleh Israel di Kota Tua Jerusalem, 16 Januari 2026



Sumber: *The Jerusalem Post*, 2026

c. **Risiko industri dan rantai pasok teknologi:** disebabkan ketergantungan pada teknologi negara tertentu.

➔ AS menguasai hampir seluruh lini rantai pasok dan ekosistem AI di Indonesia (semikonduktor, *chip* AI, *cloud*, *data centre*, model AI).

➔ Di sisi lain, teknologi RRT menguasai 85% infrastruktur telekomunikasi untuk jaringan 5G dan 4G, serta mendominasi perangkat telepon.

d. **Risiko investasi:** kompetisi antara AS dan RRT menyebabkan kebijakan yang diambil Indonesia akan "mempengaruhi persepsi" investasi teknologi ke depannya.

→ Dalam berbagai pertemuan dengan Pemri, AS menyampaikan kekhawatiran terkait dominasi RRT dalam jaringan telekomunikasi dan bahwa keadaan ini dapat mempengaruhi persepsi investasi teknologi AS ke depan.

→ Risiko *investment screening* AS.

e. **Risiko perdagangan:** keberpihakan pada hanya salah satu inisiatif dapat mempengaruhi hubungan dagang Indonesia dengan negara mitra, misalnya melalui tarif dan *export control*.

→ Tarif: sejak dinyatakan *invalid* pada Februari 2026 lalu, AS menggunakan instrumen tarif lain sebagai pengganti *Reciprocal Trade* berdasarkan *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA), yaitu *Section 122* dan *Section 301*. Pengenaan tarif *Section 301* bukan tidak mungkin digunakan oleh AS untuk mengatasi isu dalam bidang pengembangan AI.

→ *Export Control*: AS menerapkan kebijakan *export control* untuk barang dwiguna strategis, termasuk teknologi, perangkat lunak, jasa, hingga barang tidak berwujud kepada RRT. Jika dirasa terlalu berafiliasi dengan RRT, Indonesia dapat berisiko terkena *export control* oleh AS sehingga akan kesulitan dalam mengimpor teknologi AS.

f. **Risiko keberlangsungan program:**

Keberlangsungan program oleh AS sangat ditentukan oleh arah kebijakan administrasinya.

Peluang keberlangsungan program Pax Silica hingga 2050 diprediksi hanya sekitar 25%. Di satu sisi, peluang keberlangsungan program oleh RRT cenderung lebih bertahan lama dikarenakan administrasi yang lebih stabil.

Dengan mempertimbangkan adanya risiko geopolitik, politik dalam negeri, industri dan rantai pasok teknologi, investasi, perdagangan, dan keberlangsungan program, maka Pemri perlu merumuskan opsi kebijakan yang spesifik, fleksibel, & taktis dalam merespons Pax Silica dan WAICO untuk memitigasi risiko yang timbul. Namun, permasalahannya adalah RI belum memiliki strategi transisional untuk mengamankan akses teknologi global dalam membangun AI Nasional, tanpa mengurangi otonomi strategis Indonesia maupun menggeser posisi polugri Bebas-Aktif.

Dengan demikian, akar masalahnya adalah **belum adanya strategi transisional untuk mengamankan akses teknologi global dalam membangun AI Nasional, tanpa mengurangi otonomi strategis Indonesia maupun menggeser posisi polugri Bebas-Aktif.**

Policy brief ini bertujuan memberikan analisis terhadap alternatif kebijakan Indonesia dalam menyikapi inisiatif Pax Silica dan WAICO, serta

merekomendasikan opsi yang paling mendukung kepentingan nasional

berdasarkan pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)*.

III.Rekomendasi Kebijakan

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan *strategic alignment* serta tingkat intensitas keterlibatannya, *Policy Brief* ini menawarkan tiga alternatif, yaitu:

1. **Alternatif A (*Status Quo*):** Optimalisasi posisi Indonesia sebagai *Founding Member* WAICO, tanpa bergabung dalam Pax Silica. Alternatif ini menggambarkan *minimum engagement*, namun dengan risiko politik kecil.
2. **Alternatif B (*Full Engagement*):** Optimalisasi posisi Indonesia sebagai *Founding Member* WAICO sekaligus bergabung penuh dalam Pax Silica *Initiative*. Alternatif ini menggambarkan *maximum engagement* dengan kedua blok, namun dengan risiko politik yang paling besar.
3. **Alternatif C (*Calibrated Dual-Track Engagement*):** Optimalisasi posisi Indonesia sebagai *Founding Member* of WAICO, dengan memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-AS pada sektor prioritas, serta mengevaluasi kemungkinan keterlibatan yang lebih luas dalam Pax Silica ataupun bergabung dalam *Joint Statement on AI Opportunity*. Alternatif ini menggambarkan *calibrated engagement*, dengan pendekatan kehati-hatian dan terukur, namun tetap menjaga hubungan kedua pihak.

Ketiga alternatif ini dianalisis dengan menggunakan *Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)* dengan enam kriteria, yaitu *Strategic Effectiveness, Political Feasibility, Strategic Alignment, Stakeholder Support, Efficiency*, dan *Legal Suitability*.

Dari hasil MCDA, Alternatif A (*Status Quo*) memang memiliki risiko politik kecil, namun Indonesia berpotensi kehilangan manfaat dari kerja sama dengan blok AS. Sementara itu, Alternatif B (*Full Engagement*) memiliki keunggulan dalam potensi investasi yang maksimal dari kedua blok, namun memiliki risiko politik dan geopolitik paling besar, disamping resistensi *stakeholder*.

Alternatif C (*Calibrated Dual-Track Engagement*) merupakan pilihan yang paling tepat untuk diambil Pemerintah Indonesia. Pilihan ini paling tepat karena mampu menyeimbangkan potensi manfaat ekonomi dengan tetap menjaga fleksibilitas diplomasi dan memitigasi risiko strategis, yaitu:

1. Mengurangi risiko geopolitik: Alternatif C dapat mempertahankan posisi Indonesia sebagai *trusted partner* bagi kedua negara, sehingga tetap konsisten dengan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Meminimalkan risiko ketergantungan teknologi: melalui Alternatif C, Indonesia mampu mengembangkan

interoperabilitas dengan berbagai *platform* AI, menjaga keberagaman pemasok teknologi, serta meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi transfer teknologi.

3. Mengurangi risiko ekonomi: Alternatif C mendiversifikasi sumber investasi dan

perdagangan, khususnya untuk mengantisipasi perubahan arah kebijakan perdagangan dan investasi suatu negara, serta melindungi komitmen investasi dari kedua negara.

Implementasi

Langkah-langkah yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia (c.q. Kemenko Perekonomian) dalam implementasi strategi tersebut adalah:

1. **Mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai *Founding Member* WAICO** dengan pemanfaatan teknologi AI dalam bidang pertanian modern, pengelolaan energi terbarukan, serta inovasi layanan kesehatan digital.
2. **Mempercepat implementasi kerja sama bilateral Indonesia–AS** sesuai usulan Menko Perekonomian kepada *US Undersecretary of State* melalui tiga proyek prioritas, yaitu:
 - pengembangan Indonesia sebagai *trusted downstream refining hub* untuk mineral kritis;
 - mobilisasi investasi AS dan *offtake commitments* pada fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral kritis;
 - percepatan investasi *data center*, AI *infrastructure*, dan ekonomi digital berbasis inovasi.
3. **Mengadakan Rapat Koordinasi** dengan melibatkan Kementerian Luar

Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, BKPM, BRIN, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan seluruh kerja sama AI internasional selaras dengan Peta Jalan AI Nasional.

4. Melakukan **observasi dan evaluasi terhadap perkembangan Pax Silica** untuk menentukan apakah nantinya:
 - a) keterlibatan Indonesia dalam Pax Silica dapat diekskalasi menjadi partisipasi formal;
 - b) hanya menandatangani *Joint Statement on AI Opportunity Partnership*, tanpa bergabung dalam Pax Silica; atau
 - c) tetap pada kerja sama bilateral dalam bentuk kemitraan sektoral. Observasi ini berdasarkan:
 - nilai investasi yang ditawarkan AS kepada Indonesia;
 - komitmen transfer teknologi;
 - pembangunan kapasitas nasional;
 - dukungan terhadap implementasi Peta Jalan AI Nasional; dan
 - implikasi terhadap politik luar negeri bebas dan aktif.

Daftar Pustaka

1. Agreement on the Establishment of the World Artificial Intelligence Cooperation Organization (teks final).
2. Joint Statement on AI Opportunity Partnership (Adendum atas Joint Declaration), KTT Pax Silica 2026.
3. Listyaghi, H.B. 2026. Berita Rahasia Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Nomor R-00162/Beijing/260630: *Laporan Phone Demarche Kedutaan Besar AS di Beijing terkait World AI Cooperation Organization*. Beijing, KBRI.
4. Nota Diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Nomor 000774: *Invitation to Indonesia to sign a Joint Statement on Artificial Intelligence Opportunity and to participate in Pax Silica Summit on June 25, 2026*.
5. Situmorang, Pl. 2026. Berita Rahasia Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. Nomor R-00240/Washington/260702: *Laporan Penyelenggaraan Pax Silica Summit ke-2, 25-26 Juni 2026*. Washington DC, KBRI.
6. Surat Menko Perekonomian RI kepada US Under Secretary of State Nomor B/KSE.03.01-166/M.EKON/07/2026. *Strengthening Indonesia-United States Economic and Technology Cooperation*. Jakarta, 10 Juli 2026.